SKRIPSI

REPRESENTASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGANAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SEKADAU

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

KRISNO
NIM. E1051221012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

REPRESENTASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGANAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SEKADAU

Untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh

KRISNO

NIM.E1051221012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

REPRESENTASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGANAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SEKADAU

Tanggung jawab yuridis pada:

KRISNO

E.1051221012

Disetujui oleh:

Dosen pembimbing utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si
NIP. 197408102002122002

Tanggal: 7 Juli 2026

Dosen pembimbing pendamping

Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc
NIP. 19921113202203101

Tanggal: 7 Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

REPRESENTASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGANAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SEKADAU

Oleh:

KRISNO

NIM. E1051221012

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Selasa / 7 Juli 2026
Waktu	: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Seminar R-1

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si	Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc
NIP. 197408102002122002	NIP. 199211132022031012

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Zulkarnaen, M.Si	Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP. 196402081988101001	NIP. 199503282022032022

Disahkan oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dalam menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin. Permasalahan ini menjadi isu penting karena menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memunculkan konflik kepentingan di masyarakat antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Hanna Pitkin (1967) yang meliputi empat indikator, yaitu agen (yang mewakili), konstituen (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan tindakan representasi substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tenaga ahli DPRD, serta masyarakat yang terdampak maupun yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sekadau telah menjalankan fungsi representasi politik, namun belum optimal. Dalam aspek agen, DPRD telah berperan sebagai wakil rakyat dengan menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam aspek hubungan dengan konstituen, DPRD telah membuka ruang komunikasi melalui forum rapat dan pertemuan dengan masyarakat, namun masih terbatas dalam menjangkau seluruh kelompok terdampak. Dari sisi kepentingan yang diwakili, DPRD menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, dalam tindakan representasi substantif, DPRD telah melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan rekomendasi, tetapi belum menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, fungsi representasi DPRD dalam penanganan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sekadau belum berjalan secara maksimal. Diperlukan penguatan peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh serta mendorong kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Representasi politik, DPRD, penambangan emas tanpa izin, kebijakan publik, Sekadau

ABSTRACT

This study aims to analyze the political representation of the Regional House of Representatives (DPRD) of Sekadau Regency in its efforts to address illegal gold mining. This issue has become a significant concern due to its environmental, social, and economic impacts, as well as the conflicts of interest it creates within the community between economic needs and environmental preservation. This study employed Hanna Pitkin's (1967) theory of political representation, which encompasses four indicators: the agent (the representative), the constituents (those represented), the interests represented, and substantive acts of representation. The study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and a literature review. The informants consisted of members of the Sekadau Regency DPRD, DPRD expert staff, and community members affected by or involved in illegal gold mining activities. The findings indicate that the Sekadau Regency DPRD has performed its political representation function, although it has not yet done so optimally. In terms of the agent, the DPRD has acted as a representative of the people by receiving and responding to public aspirations. Regarding relationships with constituents, the DPRD has provided opportunities for communication through meetings and community forums, although its outreach remains limited in its ability to reach all affected groups. In terms of the interests represented, the DPRD faces a dilemma between the community's economic interests and environmental protection. Meanwhile, about substantive acts of representation, the DPRD has undertaken coordination and oversight and provided recommendations, but has not yet produced comprehensive and sustainable policies. In conclusion, the representative function of the Sekadau Regency DPRD in addressing illegal gold mining has not been carried out optimally. Strengthening the DPRD's role in comprehensively capturing public aspirations and promoting firmer and more sustainable policies is therefore necessary.

Keywords: Political Representation, DPRD, Illegal Gold Mining, Public Policy, Sekadau

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul *"Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sekadau yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta konflik sosial di masyarakat. Di sisi lain, aktivitas ini juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, sehingga menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representatif memiliki peran penting dalam menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau melaksanakan fungsi representasi politik dalam menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin, ditinjau dari aspek agen representasi, hubungan dengan konstituen, kepentingan yang diwakili, serta tindakan representasi substantif yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD dalam menjalankan representasi politik terhadap persoalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau, tenaga ahli DPRD, masyarakat yang terdampak maupun yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin atau

masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas tanpa izin. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Hanna Pitkin (1967) yang meliputi empat indikator utama, yaitu agen (yang mewakili), konstituen (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan tindakan representasi substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau telah menjalankan fungsi representasi politik, namun belum optimal. Dalam aspek agen, DPRD telah berperan sebagai wakil rakyat dengan menerima aspirasi masyarakat, termasuk melalui forum audiensi dan pertemuan dengan masyarakat. Dalam aspek hubungan dengan konstituen, DPRD telah berusaha membuka ruang komunikasi, namun apaya dilakukan oleh DPRD Kabupaten sekadau belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang terdampak akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Dalam aspek kepentingan yang diwakili, DPRD menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya perlindungan lingkungan. Sementara itu, dalam aspek tindakan representasi substantif, DPRD telah melakukan koordinasi, pengawasan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, namun belum menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan penambangan emas tanpa izin ini. Peneliti menyimpulkan didalam penelitian ini adalah bahwa representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dalam menangani penambangan emas tanpa izin belum berjalan secara maksimal.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara menyeluruh, adanya konflik kepentingan di masyarakat, serta belum kuatnya tindak lanjut kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPRD dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong kebijakan yang lebih tegas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik serta kelestarian lingkungan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : KRISNO

Nomor Mahasiswa : E1051221012

Program studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya dan penulisan saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu universitas atau di perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi yang saya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang disampaikan yang pernah ditulis, diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Selasa 7 Juli 2026

nyataan



KRISNO

E1051221012

MOTTO DAN PERSEMBAHAAN

Motto

"Aku mampu melewati ini semuanya bukan karna diri aku tetapi karna Tuhan yang menolong dan memampukan aku sehingga aku sampai ke titik ini"

Peneliti (KRISNO)

"Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya."

Matius 21:22 (TB)

"Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai laki-laki! Dan tetap kuat"

1 Korintus 16:13 (TB)

Persembahaan

Skripsi Ini Penulis Juga Persembahkan Untuk:

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagi juruselamat penulis, atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah hadir, mendukung, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.

1. Pertama dan yang paling utama, skripsi ini penulis persembahkan kepada kelima bersaudara tercinta penulis, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Segala perjuangan, kerja keras, dan harapan yang telah diberikan menjadi motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya ini dapat

menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan bukti kecil dari hasil perjuangan yang telah diberikan.

2. Selanjutnya, penulis persembahkan kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadiran keluarga menjadi penguat di saat penulis mengalami kesulitan dan kelelahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ini kepada para dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tulus, dan penuh tanggung jawab dalam membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari para dosen, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
4. Tidak lupa, persembahan ini juga penulis tujukan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan satu kontrakan yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap momen, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat melewati setiap proses dengan lebih kuat.
5. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan tekad dan semangat yang kuat, akhirnya semua dapat dilalui hingga sampai pada titik ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau". Skripsi ini di tulis sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari akan kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajian, karena hasil yang dicapai melalui penyususnan skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si. selaku kordinator program Studi Ilmu Politik
4. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si**.** selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc. Sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang juga beperan memberikan Bimbingan, petunjuk bimbingan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

6. Dr. Zulkarnaen, M.Si. Selaku Pembahas Pertama
7. Fusy Firda Zhan, M.Sos. Selaku Pembahas Kedua

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis salama proses pengerjan skripsi ini, mendapatkan balasan dari Tuhan dan harapan penulis biarlah hasil karya ini dapat memberikan, menyumbang pemikiran maupun acuan bagi para pembaca, untuk menulis serta memberikan manfaat yang cukup bagi kita semua, secara khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik.

Pontianak, Selasa 7 Juli 2026

Penulis



KRISNO
E.1051221012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Rumusan Masalah 11
1.4 Tujuan Penelitian 11
1.5 Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN TEORI **14**
2.1. Definisi konsep 14
2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 14
2.1.2 Penambangan Emas Tanpa Izin 15
2.2. Teori 16
2.2.1 Representasi Politik (Hanna Pitkin, 1967) 16
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 22
2.4 Alur pikir penelitian 30
2.5 Pertanyaan penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN **34**

3.1 Jenis Penelitian 34
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.3.1 Lokasi Penelitian 37
3.3.2 Waktu Penelitian 39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 39
3.4.1 Subjek Penelitian 39
3.4.2 Objek penelitian 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Alat pengumpulan Data 46
3.7 Analisis Data 48
3.8 Keabsahan Data 50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 54
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sekadau 54
4.2 Keadaan Geografis Kabupaten Sekadau 57
4.3 Gambaran Umum Sungai Sekadau 59
4.4 Gambaran Umum Penambangan Emas Tanpa Izin 61
4.5 Keadaan Demografis Kabupaten Sekadau 63
4.6 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sekadau 65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70
5.1 Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau 70
5.1.1 DPRD sebagai agen representasi (yang mewakili)……...70
5.1.2 Hubungan DPRD dengan konstituen (yang diwakili)……...75
5.1.3 Kepentingan yang diwakili oleh DPRD……78
5.1.4 Tindakan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat…….81
5.2 Pembahasan 89
5.2.1 analisis DPRD sebagai agen representasi……89
5.2.2 Analisis Hubungan DPRD dengan Konstituen……91
5.2.3 Analisis kepentingan yang diwakili……..92

5.2.4 Analisis tindakan representasi substantif……..93
BAB VI PENUTUP 96
6.1 Kesimpulan 96
6.2 Saran 98
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 103
DAFTAR PUSTAKA..... 105

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

2.1 Penelitian Yang Relevan..... 24
2.2 Alur Pikir Penelitian..... 34
3.1 Waktu Penelitian 41
4.1 Struktur DPRD..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

1.1 Dokumentasi Demo oleh masyarakat Sekadau 5
1.3 Dokumentasi penertiban Aktivitas penambangan emas tanpa izin 7
1.4 Dokumentasi kondisi sungai 7
2.2 Alur pikir penelitian 32
4.1 Peta Kabupaten Sekadau 57
4.2 Sungai sekadau 51
4.3 Gambar Alat Penambangan emas 62
5.1 Demo Masyarakat di Kantor DPRD Kabupaten Sekadau 74
5.2 Dokumentasi kondisi sungai sekadau yang tercemar 76
5.3 Dokumentasi aktivitas penambangan emas 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....105

Lampiran 2 Nama-Nama Imforman.....108

Lampiran 3 Dokumentasi.....109

Lampiran 4 Surat penelitian.....112

Lampiran 5 Biodata penulis.....113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Daerah merupakan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Landasan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penataan kelembagaan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem otonomi daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga politik yang memiliki kedudukan strategis dalam mewakili kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun demikian, di balik ketiga fungsi

tersebut, terdapat fungsi mendasar yang menjadi esensi keberadaan DPRD, yaitu fungsi representasi politik.

Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengandung makna bahwa anggota DPRD tidak hanya hadir sebagai pejabat politik formal, tetapi sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk menyerap, menyalurkan, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat (konstituen). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, keberhasilan DPRD tidak semata-mata diukur dari jumlah produk legislasi atau pengawasan anggaran, tetapi dari sejauh mana DPRD mampu bertindak atas nama kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menjalankan fungsi representasi sebagai wujud peran DPRD dalam mewakili, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat daerah. Di antara fungsi-fungsi tersebut, fungsi representasi menjadi inti keberadaan DPRD sebagai lembaga politik yang merepresentasikan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Ridho (2017) menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan

masyarakat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik. Fungsi representasi menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan daerah. Dalam konteks demokrasi perwakilan, representasi politik tidak semata-mata dimaknai sebagai keberadaan wakil rakyat secara formal, melainkan ditentukan oleh tindakan nyata wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya. Pandangan tersebut sejalan dengan teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna F. Pitkin (1967), yang menyatakan bahwa representasi politik mencakup tindakan wakil rakyat yang bertindak untuk kepentingan pihak yang diwakilinya (*acting for*), bukan sekadar representasi simbolik atau formal. Dengan demikian, kualitas fungsi representasi DPRD dapat diukur dari sejauh mana mampu menyerap aspirasi masyarakat, mengartikulasikannya dalam forum-forum politik, serta bertindak secara substantif dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi semakin penting ketika daerah dihadapkan pada persoalan publik yang kompleks dan berdampak luas, salah satunya adalah permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin. Di Kabupaten Sekadau, aktivitas penambangan emas tanpa izin telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran sungai, kerusakan lingkungan, penurunan kualitas air, serta risiko kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, sehingga

menimbulkan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.

Penambangan emas tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional maupun menggunakan peralatan modern tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryawati, 2017). Kondisi ini menunjukkan adanya beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat yang saling berhadapan. Sebagian masyarakat menuntut penindakan tegas terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sementara sebagian lainnya mengharapkan solusi kebijakan yang tidak menghilangkan sumber mata pencaharian mereka. Dalam situasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representatif dituntut untuk menjalankan fungsi representasinya secara optimal dengan menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara adil dan berimbang. Namun, berbagai aksi demonstrasi dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sekadau menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi tersebut masih dipersepsikan belum berjalan secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau telah menjalankan fungsi representasi dalam menangani persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin. Berikut merupakan data terkait demo atau protes yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat di kabupaten sekadau:

Gambar 1.1

Dokumentasi demo oleh masyarakat Sekadau



Sumber: Suarakalbar.co.id (2025)

Berdasarkan sumber data dari website media daring, diberitakan bahwa masyarakat dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Sekadau Hulu mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau, untuk menuntut penindakan atas pencemaran sungai akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin. Ratusan warga tersebut menggelar aksi unjuk rasa damai pada Jumat (11/7/2025) sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan protes terhadap pencemaran Sungai Ntorap yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin. Warga yang terlibat berasal dari Desa Boti, Sungai Sambang, Nanga Biaban, Cupang Gading, Mondi, Nanga Menterap, dan Sunsong, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Air Sungai Ntorap. Massa aksi mendatangi gedung DPRD Sekadau menggunakan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat sejak pukul 09.00 WIB.

Dalam konteks representasi DPRD, peristiwa ini mencerminkan pelaksanaan fungsi representasi politik, di mana DPRD menjadi ruang institusional bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kepentingan publik secara langsung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, khususnya dalam isu lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pada pukul 10.30 WIB, perwakilan demonstran diterima secara resmi oleh jajaran DPRD Kabupaten Sekadau bersama sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Kabupaten Sekadau. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat komisi DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sekadau, Jeffray Raja Tugam. Tindakan menerima dan memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat ini menunjukkan bentuk representasi substantif, di mana DPRD tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga menjalankan perannya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui dialog, koordinasi, dan potensi pengambilan kebijakan.

Adapun data pendukung dari Polres Sekadau (2025) menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya 18 yunit rakit tambang ilegal yang ditemukan di Sungai Kapuas, Dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Selain itu, di wilayah Kecamatan Belitang Hilir dan Nanga Mahap dilaporkan terdapat lebih dari 100 mesin tambang emas tanpa izin yang masih aktif beroperasi di beberapa dusun, seperti Entabuk, Tembaga, dan Landau Apin. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem sungai, meningkatnya tingkat

kekeruhan air, serta pencemaran akibat penggunaan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan (Agaranews.com, 2025).

Gambar 1.3

Dokumentasi penertiban aktivitas PETI



Sumber: Dermagafm.com/2025/10/18

Dari hasil dokumentasi diatas yang menunjukan adanya penambangan emas tanpa izin sehingan ditertibkan oleh aparat kepolisian di dalam razia yang dilaksanakan oleh kepolisian yang ada dikabupaten Sekadau. Dapat kita lihat juga didalam dokumentasi tersebut terdapat alat-alat penambang yang digunakan oleh masyarakat yang menjadi penambang untuk melakukan penambangan emas secara ilegal.

Gambar 1.4

Dokumentasi kondisi sungai



Sumber: Media BUSER86 (2025)

Menurut laporan dari Penasilet.Com (2025), aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi lingkungan di beberapa wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat sejumlah daerah yang tercatat mengalami tingkat kerusakan paling parah akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Sekadau, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Nangga Mahap, Kecamatan Nanga Taman. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, aktivitas penambangan emas tanpa izin juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian warga menggantungkan penghidupan pada tambang ilegal ini, namun di sisi lain mereka menghadapi risiko kesehatan akibat paparan merkuri serta konflik sosial akibat perebutan lokasi tambang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas tersebut, sekaligus lemahnya alternatif mata pencaharian yang disediakan

pemerintah daerah. Masalah Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek politik dan sosial. Aktivitas PETI menimbulkan perbedaan kepentingan di masyarakat. Sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut, sementara sebagian lain menolak karena dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan dilema yang memerlukan perhatian dan tindakan dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Sebagai lembaga yang memiliki Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya mampu menampung, menyuarakan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait persoalan tersebut. Fungsi representasi terlihat dari sejauh mana anggota DPRD mampu mewakili aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak aktivitas penambangan emas tanpa izin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana DPRD Kabupaten Sekadau menjalankan fungsi representasi dalam menangani masalah penambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Sekadau. Hingga saat ini, penelitian tentang peran DPRD dalam penanganan PETI di Kabupaten Sekadau belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis fungsi representasi DPRD sebagai lembaga dalam menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, "**Skripsi ini difokuskan pada pelaksanaan representasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dalam menangani aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin. Kabupaten Sekadau dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya dinamika tuntutan masyarakat yang secara langsung diarahkan kepada DPRD sebagai lembaga representasi politik di tingkat daerah"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan dan aksi protes masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sekadau terkait dampak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin, yang menunjukkan adanya harapan masyarakat terhadap peran representatif DPRD dalam merespons persoalan tersebut.
2. Belum tergambarnya secara jelas pola hubungan antara DPRD dan masyarakat (konstituen) dalam proses penyerapan dan penyaluran aspirasi terkait permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sekadau.
3. Adanya perbedaan kepentingan di tengah masyarakat terdampak Penambangan Emas Tanpa Izin, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan lingkungan, yang memerlukan peran DPRD dalam menentukan kepentingan mana yang diperjuangkan.
4. Belum diketahui secara mendalam bentuk tindakan DPRD dalam merespons dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait Penambangan

Emas Tanpa Izin, baik dalam bentuk pengawasan, rekomendasi kebijakan, maupun tindakan representasi substantif lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas diatas maka rumusan masalah yang diambil peneliti yaitu "Bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau melaksanakan representasi politik dalam menangani permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin, ditinjau dari peran agen representasi, hubungan dengan konstituen, kepentingan yang diwakili, serta tindakan representasi substantif yang dilakukan?".

1.4 Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis representasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dalam menangani permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin, ditinjau dari peran DPRD sebagai agen representasi, hubungan dengan konstituen, kepentingan yang diwakili, serta tindakan representasi substantif yang dilakukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah manfaat Teoretis, Praktis dan manfaat sosial:

1. Manfaat Teoretis:

   Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya terkait fungsi representasi DPRD di tingkat daerah dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan sosial. Secara teoritis, skripsi ini

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian tentang fungsi representasi lembaga legislatif daerah. Bagi mahasiswa Ilmu Politik, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian empiris untuk memahami bagaimana teori representasi politik (Pitkin, 1967) diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada permasalahan lingkungan seperti penambangan emas tanpa izin. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang praktik demokrasi lokal, tetapi juga memperluas ruang analisis terhadap peran lembaga politik daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

2. Manfaat Praktis:

   Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan efektivitas peran dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terutama dalam penanganan masalah PETI. Hasil skripsi ini dapat menjadi masukan penting bagi DPRD Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan efektivitas peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, khususnya dalam menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin. Melalui temuan di dalam isi skripsi ini, DPRD diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan, memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak, serta mendorong kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam daerah.

3. Manfaat Sosial:

Skripsi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memperjuangkan aspirasi mereka, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam penyelesaian masalah lingkungan di daerah. Skripsi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka, terutama dalam menghadapi permasalahan lingkungan di daerah. Selain itu, isi dari skripsi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, sehingga tercipta kerja sama yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan seperti penambangan emas tanpa izin.